

## **Pemilukada: Menguatnya Politik Oligarki Lombok Timur Tahun 2013**

**Oleh: Fajar Kuala Nugraha**

### **Abstrak**

Gagasan tulisan ini berangkat dari hasil penelitian skripsi yang berjudul “Struktur Elit Masyarakat dan Pola Relasi Oligark dalam Memperkuat Politik Oligarki: Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013”. Salah satu tema penting dan banyak diperdebatkan dalam studi-studi politik kontemporer Indonesia saat ini adalah terkait dengan masuknya para pengusaha dalam pusaran politik. Bagi Jeffrey Winters keadaan tersebut dibaca sebagai sebuah oligarki, di mana oligarki tidak lagi dipandang sebagai penguasaan segelintir elit namun lebih kepada masuknya para pengusaha atau lazim disebut sebagai oligark dalam struktur politik untuk pertahanan kekayaan. Hal sama yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Lombok Timur tahun 2013. Pada Pemilukada tahun 2013 indikasi kemunculan oligark mengerucut pada pasangan calon perseorangan yakni Ali BD dan Khaerul Warisin (Alkhaer) karena keduanya merupakan pasangan pengusaha paling berpengaruh, khususnya di Lombok Timur. Dalam memenangkan Pemilukada pasangan Alkhaer menggunakan dua sumberdaya kekuasaan yaitu, kekuasaan material yang merupakan kekuasaan utama seorang oligark dan kekuasaan mobilisasi. Kombinasi dua sumberdaya kekuasaan tersebut berhasil memenangkan pasangan Alkhaer dalam pemilukada mengungguli pasangan lain dari gabungan koalisi partai politik, bahkan calon petahana (pasangan Sufi). Kemenangan tersebut kemudian memperkuat proses oligarki yang telah terjadi di Lombok Timur. Oligarki yang tidak hanya dipahami penguasaan segelintir elit, tetapi telah bertransformasi menjadi kekuasaan para pengusaha dalam upaya pertahanan kekayaan.

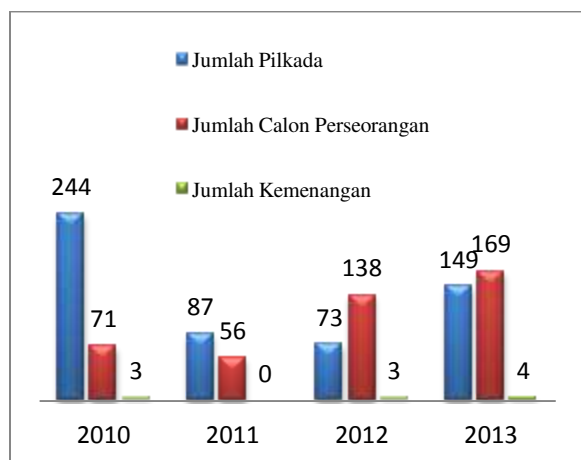
**Kata Kunci: Oligark, Pemilukada, dan Oligarki.**

### **Pengantar**

Fenomena kemenangan pasangan Alkhaer yang notabeneanya berasal dari jalur perseorangan dalam Pemilukada Lombok Timur tahun 2013 merupakan setitik asa baru bagi perkembangan kandidasi calon perseorangan. Mengapa demikian, berdasarkan data persebaran kandidasi calon perseorangan dari 2008-2013, maka didapati adanya ketimpangan antara tingginya angka kontestasi dengan angka kemenangan. Jika ditotal hanya terdapat sekitar 12 kandidat calon yang berhasil memenangkan Pemilukada. Persebaran data tersebut kemudian dapat dilihat dalam diagram 1 di bawah.

Diagram di bawah memperlihatkan bahwa, pada tahun 2008 tercatat hanya terdapat empat calon perseorangan yang berhasil menang. Angka kemenangan kemudian menurun pada tahun 2010 yang hanya berhasil memenangkan tiga pasangan calon. Keadaan tersebut terus memburuk di mana tidak satupun calon perseorangan menang pada Pemilukada tahun 2011, dan sedikit meningkat pada Pemilukada tahun 2012 dan 2013 yang masing-masing memenangkan satu dan empat calon perseorangan.

**Diagram 1: Kontestasi Calon Perseorangan**



Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2014.

Apakah kemudian kemenangan calon perseorangan tersebut merupakan pembuktian bahwa calon perseorangan masih memiliki posisi tawar cukup kuat di masyarakat? Di satu sisi boleh jadi hal tersebut memang terbukti adanya. Namun di sisi lain jika dianalisis lebih mendalam, kemenangan pasangan Alkhaer boleh jadi bukanlah suatu hal yang mengejutkan.

Jika dirunut dan diperhatikan secara seksama, struktur kekuasaan Lombok Timur tersusun atas beberapa lapisan elit yang terus mendominasi dalam beberapa dekade terakhir. Nama-nama seperti Ali BD, Sukiman Amy, dan Syamsul Luthfi merupakan beberapa nama lama yang kembali muncul dalam Pemilukada tahun 2013. Nama Ali BD khususnya telah “menghiasi” perebutan jabatan pimpinan daerah sejak kepala daerah masih dipilih oleh parlemen, tepatnya pada periode tahun 1999-2003 dan terus berlanjut pada Pemilukada tahun 2013.

Artinya bahwa tidak ada perubahan struktur kekuasaan cukup signifikan yang terjadi dalam perpolitikan Lombok Timur. Boleh jadi pola koalisi dan peta dukungan telah berubah, namun satu yang pasti bahwa aktor atau elit yang bermain tetaplah sama. Jalur perseorangannya tak ubahnya hanya digunakan sebagai instrumen baru dalam perebutan

kekuasaan. Akibatnya, kemunculan calon perseorangan dianggap telah gagal memutus “mata rantai” elit-elit politik lokal Lombok Timur. Lebih jauh lagi kehadiran demokrasi (liberal) melalui Pemilukada setelah jatuhnya otoritarianisme<sup>1</sup> yang diharapkan mampu menciptakan sirkulasi elit, pada praktiknya tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan.

Dapatkah kondisi ini dianggap sebagai bentuk oligarki? Pada tingkat analisis dominasi segelintir elit keadaan tersebut mungkin dapat dikategorikan sebagai bentuk oligarki jika merunut definisi generik oligarki. Namun jika melihat realitas di lapangan, telah terjadi pergeseran cukup signifikan dalam mendefinisikan oligarki. Hal tersebut merupakan implikasi dari terpecahnya masyarakat Lombok Timur. Elit tidak lagi menjadi aktor dominan dalam struktur kekuasaan, namun telah memunculkan oligark (individu superkaya) akibat persebaran kekayaan yang tidak merata. Kondisi tersebut menghasilkan pertarungan antara elit dan oligark dalam arena Pemilukada.

Hal tersebut dibuktikan dengan majunya Ali BD melalui jalur perseorangan. Setelah lengser dari jabatan kepala daerah, Ali BD bertransformasi menjadi individu yang superkaya dengan ekspansi bisnis yang terus dilakukan. Keikutsertaan Ali BD sebagai seorang oligark diikuti dengan penunjukkan wakilnya yang juga berasal dari sesame oligark. Artinya kemudian corak oligarki Lombok Timur lebih pada upaya oligark dalam pertahanan dan perluasan kekayaan.

Untuk membuktikan semua asumsi terkait berlangsungnya oligarki di Lombok Timur seperti yang telah dipaparkan di atas, pertama-tama tulisan ini akan mendefinisikan

<sup>1</sup> Yuki Fukuoka. “Oligarchy and Democracy in Post Suharto Indonesia” dalam jurnal *Political Studies Review: 2013 Vol 11*. Australia: Political Studies Association. 2013. Hlm. 52.

kembali apa itu oligarki, terutama merujuk pada teori oligarki Jeffrey A. Winters. Pada bagian selanjutnya akan diperlihatkan bagaimana kemunculan oligark di Lombok Timur, terutama motifnya untuk pertahanan dan perluasan kekayaan. Kemudian akan disajikan dua sumberdaya kekuasaan utama yang digunakan pasangan Alkhaer untuk memenangkan Pemilu. Kesemua penjabaran tersebut pada akhirnya diharapkan mampu menjawab pertanyaan besar “bagaimana calon perseorangan yang notabene oligark mampu menang dalam Pemilu Lombok timur tahun 2013?”

### Mendefinisikan Ulang Oligarki

Hingga saat ini belum ada definisi baku yang diberikan oleh para ilmuwan-ilmuwan terkait dengan oligarki. Hal tersebut didasarkan karena perbedaan persepsi yang diberikan masing-masing ilmuwan. Beberapa kalangan ilmuwan menganggap oligarki merupakan sebuah konsep jika merujuk pada pendapat James Payne maupun Leach. Oligarki juga dapat dianggap sebagai sebuah bentuk pemerintahan jika merunut pendapat Aristoteles dan Roberth A. Dahl.<sup>2</sup> Implikasinya juga terlihat dari penyebutannya yang beragam seperti *Grao Fino* (brazil), *Rosca* (Bolivia), dan *Oligarquia* (Peru), dimana sebagian besar sumberdaya kekuasaan material berasal dari kepemilikan atas tanah (tuan tanah).<sup>3</sup>

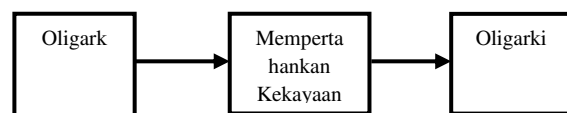
<sup>2</sup> Penggagas oligarki pertama merupakan Aristoteles dengan tipologi pemerintahannya yang paling berpengaruh yang menganggap oligarki sebagai bentuk korup dari aristokrasi. Sedangkan dahl menyebut oligarki sebagai oligarki kompetitif dalam bukunya yang paling berpengaruh berjudul *Poliarchy: Partisipating dan Opposition*.

<sup>3</sup> Francois Bourricaud. “Structure and Function of The Peruvian Oligarchy. dalam *Journal Comparative International Development*. Springer Science & Bussines Media B.V. Hlm. 17-18. Sebagian kasus Amerika Latin memperlihatkan bahwa oligark mereka di bangun berdasarkan kekuasaan atas

Posisi teoritik berbeda diungkapkan oleh Jeffrey A. Winters, yang menganggap oligarki sebagai sebuah bentuk teori. Bagi Jeffrey A. Winters, oligarki bukan semata-mata kekuasaan politik di tangan minoritas kecil elit-elit politik (definisi generik), namun mengalami penyempitan makna ke arah definisi oligarki spesifik. Winters memahami oligarki sebagai pemusatan kekuasaan pada segelintir elit, terutama elit-elit pemegang kekayaan (kaum borjuis). Berdasarkan pemahaman oligarki yang dikemukakan Winters muncul pula istilah oligark, merupakan aktor elit oligarki di suatu negara dengan kekayaan pribadi sangat besar.

Oligark memiliki kekayaan di atas rata-rata bahkan di atas kekayaan rata-rata kekayaan orang kaya sekalipun, atau bisa disebut individu sebagai super kaya. Masuknya para oligark dalam ranah politik didasarkan pada kegagalan negara dalam menjaga kekayaan mereka, dari berbagai macam ancaman, bahkan ketika ancaman tersebut datang dari negara.<sup>4</sup> Karena itu dapat disimpulkan bahwa oligarki bukan sekedar bagaimana suatu minoritas kecil mendominasi mayoritas, namun oligarki lebih pada bagaimana para individu pemilik kekayaan berupaya mempertahankan kekayaan. Pemahaman tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 2.2 di bawah ini:

**Bagan 1: Proses Pertahanan Kekayaan Oligark**



Sumber: Diadaptasi dari Jeffrey A. Winters

pemilikan tanah, terkecuali kasus Meksiko. Meksiko dianggap negara yang tengah berkembang karena telah terjadi sistem revolusi agrarian dan telah berkembang ke arah negara industrialisasi.

<sup>4</sup> Jeffrey A. Winters. “Oligarchy and Democracy”. dalam *Jurnal The American Interest Volume VII, 2 Holidays (November/December 2011)*. Washington DC: The American Interest. 2011. Hlm. 20.

Bagan di atas berusaha menjelaskan bahwa logika yang digunakan oleh Winters dalam menjelaskan tentang oligarki. Dalam bukunya yang berjudul *Oligarki*, Winters berusaha membalikkan logika umum yang lazim digunakan dalam menjelaskan oligarki.<sup>5</sup> Bagi sebagian besar kepustakaan terkait oligarki, fokus utama analisis akan terlebih dahulu mendefinisikan oligarki kemudian melacak para oligark pembentuk oligarki tersebut. Namun Winters mencoba membalikinya, dengan terlebih dahulu menjelaskan oligark secara komprehensif kemudian menjelaskan bagaimana oligark tersebut menciptakan sebuah oligarki dalam suatu tatanan politik.

Asumsi serta argumen Winters tersebut kemudian menghasilkan suatu analisis yang berhasil membedakan antara elit dan oligark. Meskipun kedua istilah ini sama-sama lazim digunakan dalam beberapa kajian oligarki, namun terdapat batasan tegas antara keduanya. Meskipun memberikan batasan tegas, Winters justru tidak memberikan argument tegas mana yang kemudian lebih tepat digunakan dalam menjelaskan oligarki. Karena disadari atau tidak Winters juga masih sering mencampurkan kedua istilah tersebut dalam beberapa karyanya. Untuk lebih jelas mengenai hal tersebut dapat dilihat dalam tabel 1 di bawah.

Setelah berhasil membedakan antara elit dan oligark seperti yang dijelaskan dalam tabel di atas, Winters analisis Winter juga dapat dijadikan acuan keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan, karena pada dasarnya tidak semua oligark terjun langsung dalam perebutan kekuasaan. Kadar keterlibatan oligark dalam perebutan kekuasaan melalui politik praktis dapat diukur melalui seberapa besar ancaman terhadap kekayaan para oligark. Semakin besar kadar ancaman kekuasaan

semakin aktif para oligark dalam perebutan kekuasaan baik melalui Pemilu maupun Pemilu. Berbeda halnya ketika ancaman terhadap kekayaan oligark relatif kurang, bahkan cenderung mendapatkan perlindungan dari negara maka dapat dipastikan keterlibatan oligark dalam politik praktis sangat pasif. Sebagai gantinya para oligark akan berusaha membangun hubungan patron klien dengan aktor-aktor negara.

**Tabel 1: Perbedaan Elit dan Oligark**

No.	Indikator	Elit	Oligarki
1.	Pemahaman utama	Minoritas pelaku di puncak masyarakat yang berpengaruh karena mereka memegang jabatan di organisasi-organisasi besar.	Aktor yang memimpin dan mengontrol sebagian besar material yang terpusat, di mana bekerja untuk mempertahankan kekayaan dalam status sosial eksklusif
2.	Masalah inti	Perebutan kekuasaan	Pertahanan kekayaan
3.	Dasar Kemunculan	Struktur kelas yang terdapat di masyarakat	Konsentrasi kekayaan yang cukup ekstrem di masyarakat
4.	Sumberdaya kekuasaan	Sumberdaya kekuasaan berasal dari non material seperti jabatan baik jabatan formal maupun informal, sehingga ketika masa jabatan telah usai berbagai kekuasaan yang dimiliki secara otomatis juga menghilang bahkan tidak akan menjadi elit kembali	Sumberdaya kekuasaan utama adalah material (dengan bentuk yang beragam), sehingga menjabat atau tidak menjabat kekuasaan besar tetap dimiliki oligark di tengah masyarakat.
5.	Jumlah penguasa	Minoritas elit (berdasarkan pendidikan dan informasi, kerumitan organisasi, etnis, jejaring eksklusif)	Tidak tergantung pada minoritas maupun mayoritas bilamana jika berkuasa berdasarkan kekayaan

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber, 2014.

Kadar keterlibatan oligark dalam politik praktis melalui Pemilu atau Pemilu juga menjadi jawaban atas pertanyaan kritis yang dilontarkan oleh beberapa kalangan yang menyatakan bagaimana mungkin oligark dan demokrasi dapat berjalan dalam satu sistem politik. Meskipun pada dasarnya oligarki dan demokrasi memiliki dasar kekuasaan berbeda, di mana oligark meletakkan konsentrasi kekuasaan pada kekayaan (klaim terhadap kepemilikan dan kekayaan), sedangkan demokrasi meletakkan konsentrasi pada persebaran kekuasaan non-material (hak, prosedur, dan tingkat partisipasi).

Implikasinya adalah demokrasi telah dimanfaatkan oleh para oligark hingga akhirnya

<sup>5</sup> Jeffrey A. Winters. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia. 2011. Hlm. 18.

menciptakan demokrasi di bawah bayang-bayang oligarki. Demokrasi tidak akan berhasil menghentikan para oligark untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan, sebaliknya para oligark melakukan berbagai cara demi menyesuaikan diri pada demokrasi. Hal sama yang terlihat di Indonesia pada umumnya dan Lombok Timur pada khususnya. Berawal dari munculnya regulasi kapitalisme dan pasar bebas di Indonesia, hubungan negara dan modal telah menjadi basis bagi kapitalisme pemangsa yang tidak dengan mudah terpengaruh pada pembaharuan kelembagaan.<sup>6</sup> Hasilnya demokrasi Indonesia telah bertransformasi menjadi sebuah “demokrasi borjuis” gaya Barat, dan menguatkan diktum terkenal Barrington Moore yang menyatakan bahwa “*no bourgeois, no democracy*”.

Tingginya keterlibatan oligark dalam politik praktis pada beberapa di daerah di Indonesia seperti Lombok Timur melalui Pemilukada sangat dimungkinkan karena besarnya kekuasaan material yang dimiliki. Faktor kekuasaan material memainkan peran penting dibalik kemenangan pasangan Alkhaer dalam Pemilukada Lombok Timur. Selain itu catatan menarik memperlihatkan bahwa kemenangan tersebut tidak hanya disokong oleh kekuasaan material tetapi juga kekuasaan mobilisasi yang notabene merupakan kekuasaan yang identik dimiliki oleh elit. Artinya bahwa pasangan Alkhaer tidak hanya merupakan seorang oligark, namun jika ditelusuri juga merupakan seorang elit.

Berangkat dari gagasan tersebut kemudian muncul pertanyaan, bagaimana oligark Lombok Timur dapat muncul? Apakah kemunculan tersebut karena motif untuk mempertahankan dan perluasan kekayaan? Pertanyaan pertanyaan tersebut pada akhirnya

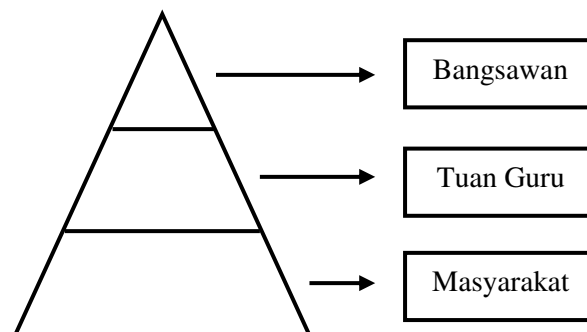
<sup>6</sup> Vedi R. Hadiz. “The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik”. dalam *Prisma Vol. 32, No. 1, 2013*. Jakarta: LP3ES. 2013. Hlm. 15

akan berusaha di jelaskan pada sub bab selanjutnya di bawah ini.

### Kemunculan Oligark Lombok Timur

Pada beberapa kepustakaan Lombok Timur khususnya struktur kekuasaan masyarakat terbangun seperti piramida. Piramida tersebut terbagi atas tiga tingkatan yakni, bangsawan, Tuan Guru, dan masyarakat biasa (untuk lebih jelasnya perhatikan bagan 2). Stratifikasi bertingkat pada masyarakat Lombok Timur berdasarkan piramida tersebut didasarkan atas beberapa faktor, terutama pengaruh dan posisi individu tersebut di tengah masyarakat. Individu dengan posisi tertinggi merupakan kelompok yang mendapatkan penghormatan lebih dari lapisan masyarakat biasa.

**Bagan 2: Stratifikasi Masyarakat Lombok Timur**



Sumber: Diolah Penulis, 2014.

Stratifikasi bertingkat masyarakat tersebut kemudian berdampak pada kemunculan kelas-kelas sosial dengan kekuasaan terpusat pada satu kelompok tertentu. Suzana Keller dalam bukunya berjudul *Penguasa dan Kelompok Elit*, menyebutnya sebagai seorang elit-elit penentu. Elit penentu lahir sebagai dampak dari heterogenitas masyarakat baik dalam segi usia, jenis kelamin, kesukuan, kecakapan, kekuatan dan beberapa hal lainnya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Suzana Keller. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Press. 1984. Hlm. 45.

Jika tingkat diferensiasi dalam masyarakat rendah maka akan memungkinkan timbulnya kaum elit penentu dengan jumlah rendah pula, begitu juga sebaliknya jika tingkat diferensiasi dalam masyarakat tinggi maka akan memunculkan elit penentu dengan jumlah banyak dengan persebaran cukup luas.

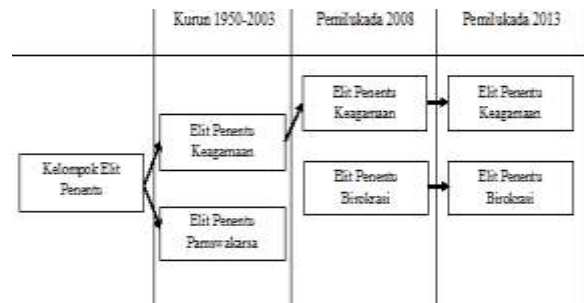
Dalam konteks Lombok Timur, elit penentu dalam struktur kekuasaan tidak jauh berbeda dengan apa yang digambarkan pada bagan 2 di atas. Meskipun dalam era kontemporer, terjadi sedikit pergeseran terutama ketika para bangsawan mulai kehilangan kekuasaan dan digantikan oleh elit penentu lainnya. Elit Lombok Timur juga tidak hanya digambarkan sebagai seorang individu, tetapi bertransformasi dan terbentuk atas dasar kelompok yang menyokong individu tersebut.

Secara garis besar elit penentu Lombok Timur datang dari tiga kelompok utama yakni, pertama NW dengan basis pondok pesantren dan beberapa lembaga pendidikan lain. Kedua, Kelompok pamswakarsa (misalnya Amphibi) dengan basis milisi keamanan sipil. Ketiga, birokrasi dengan basis pengaruh dan kedekatannya dengan para pemimpin pemerintahan. Untuk lebih jelas ketiga kelompok elit penentu tersebut dapat dijelaskan pada bagan 3 di bawah.

Ketiga kelompok tersebut secara bergantian menempatkan tokoh-tokohnya menjadi elit penentu dalam setiap kegiatan politik. Ketiga kelompok tersebut secara konsisten tetap bertahan dalam puncak kekuasaan, meskipun beberapa kali terjadi pergeseran kekuasaan namun dapat dipastikan ketiga kelompok tersebutlah yang terus mendominasi pemerintahan. Dalam kurun waktu mulai tahun 1950-an hingga 2003 kekuatan elit penentu terkonsentrasi pada kelompok keagamaan (NW) dan pamswakarsa (Amphibi).

Setelah kejatuhan Amphibi<sup>8</sup> dan terutama memasuki Pemilu 2008 langsung elit penentu NW masih terus memainkan peran sentralnya diikuti dengan kemunculan elit penentu dari kalangan birokrasi. Begitu juga pada Pemilu 2013 kekuatan dua kelompok elit penentu tersebut cukup kuat dalam memberikan corak kekuasaan.

**Bagan 3: Kelompok Elit Penentu Lombok Timur**



Keterangan  
 → : Konstan

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2014.

Pada titik ini calon oligark Lombok Timur memang belum terlihat. Indikasi kemunculan tersebut semakin menguat ketika Pemilu 2013 berlangsung. Tingginya biaya politik dalam Pemilu 2013 menjadikan kemunculan oligark sebagai sebuah keniscayaan. Kaum oligark muncul menggantikan elit-elit lama yang telah mapan dan memiliki kekuasaan

<sup>8</sup> Kemunduran Amphibi dari peta kekuatan politik mulai terjadi seiring berkurangnya kekuasaan serta pengaruh kelompok tersebut di masyarakat. Berawal dari kegagalan Amphibi dalam menaklukkan sebuah desa di Lombok Barat bernama Parampuan, tepatnya pada tahun 2001. Kegagalan tersebut menyebabkan perpecahan di tubuh organisasi Amphibi, dimana sebagian besar masih tetap mempertahankan kantor-kantor cabang besar di Lombok Barat, namun tidak lagi mematuhi kepemimpinan pusat Amphibi di Lombok Timur. Hingga akhirnya Amphibi menjadi tidak terorganisasi dan terpecah di berbagai cabang-cabang seperti Mataram dan mulai melakukan pemerasan kecil-kecilan sebagai penyokong pendapatan mereka yang semakin terlokalisir.

cukup kuat di masyarakat. Elit-elit lama berhasil dikalahkan hanya dengan kekuasaan material yang dimiliki oleh kaum oligark.

Mengerucutnya indikasi oligark pada calon perseorangan (Alkhaer) didasarkan atas kekayaan yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Baik Ali BD maupun Khaerul Warisin merupakan dua sosok pengusaha paling berpengaruh di Lombok Timur. Jaringan bisnis Ali BD tersebar mulai dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Segara Anak, BPR Bima Abdi Swadaya (BIAS), BPR Qirad, PT, Genta Bumi Selaparang (GBS), PT. Nusa Internasional, Aken Life, Koperasi Samsambo (Sasak, Samawa, Mbojo).<sup>9</sup>

Luasnya jaringan bisnis Ali BD juga tidak kalah dengan wakilnya yakni, Khaerul Warisin. Basis utama bisnis Khaerul Warisin dibangun atas dasar posisinya sebagai distributor utama persebaran pupuk di Lombok Timur bahkan Pulau Lombok dan Sumbawa. PT. Petrokimia Gresik bahkan telah menjadi rekanan bisnisnya sejak tahun 1998 dan terus berkembang hingga kini. Di samping itu diketahui bahwa Khaerul Warisin juga memiliki SPBU yang letaknya berada di pusat kota yang sangat strategis.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Riyanto Rabbah. *Ali BD: Sang Pendobrak*. Mataram: ADC Institute. 2013. Hlm. 79 dan 89. Akuisisi terhadap BPR BIAS mulai dilakukan Ali BD pada tahun 1996 ketika perusahaan tersebut hampir kolaps dengan mengambil alih 90 persen sahamnya. Selanjutnya BPR Tanjung dan BPR Qirad diakuisisi pada tahun 1997 dengan keadaan tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan terhadap BPR BIAS. Pendirian PT. Nusa Internasional, Aken Life, dan Samsambo merupakan langkah strategis yang dilakukan setelah PJTKI GGS muncul. PT. Nusa Internasional digunakan sebagai instrumen travel bagi para TKI yang akan berangkat sedangkan Aken Life, dan Samsambo digunakan sebagai asuransi bagi TKI.

<sup>10</sup> Wawancara dengan M.Sholeh pada tanggal 20 April 2014 pukul 17.45.

Luasnya jaringan bisnis pasangan Alkhaer berdampak pada peningkatan angka kekayaan dua kandidat dari calon perseorangan tersebut hanya dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Kekayaan Ali BD meningkat 5,4 miliar rupiah dari tahun 2008, sedangkan untuk Khaerul Khaerul Warisin peningkatan kekayaan menjadi cukup mencengangkan. Peningkatan kekayaan Khaerul Warisin bahkan mencapai 11 kali lipat hanya dalam kurun waktu 2 tahun dan menyentuh angka 12,9 miliar. Jika dikomparasikan berdasarkan rilis daftar pejabat terkaya se-provinsi NTB pada akhir tahun 2010, nama Ali BD dan Khaerul Warisin hanya kalah dari Walikota Bima Qurais H. Abidin yang kekayaannya menyentuh angka 16,71 miliar.<sup>11</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah.

Berdasarkan tabel 2 di bawah maka dapat disimpulkan bahwa pasangan perseorangan menjadi kandidat terkaya dalam Pemilu tahun 2013. Kekayaan pasangan calon perseorangan jauh mengungguli pasangan petaha dan dua calon lainnya. Besarnya material pasangan Alkhaer di atas pada nantinya akan memiliki korelasi dengan kemenangannya seperti yang akan dijelaskan pada bagian lain di bawah. Kekayaan ini pula yang menjadi alasan utama di balik alasan lain dipilihnya jalur perseorangan sebagai instrumen untuk merebut kembali posisi kepala daerah. Namun terlebih dahulu untuk memperkuat asumsi serta argumen calon perseorangan merupakan oligark akan

---

<sup>11</sup> Diakses melalui laman web <http://metropolitan.inilah.com> dengan artikel berjudul "Inilah Daftar Pejabat Terkaya Se-Provinsi NTB" pada tanggal 30 April 2013 pukul 01.10. Pada tahun 2010 KPK melakukan rilis terhadap kekayaan para penyelenggara pemerintahan di Provinsi NTB. Untuk pejabat terkaya dipegang oleh Walikota Bima dengan kekayaan menyentuh angka 16,71 miliar dan H.A Karim Razak tercatat sebagai pejabat dengan angka kekayaan terendah yakni hanya 318,6 juta. Untuk gubernur NTB sendiri hanya menempati posisi ketiga dan wakilnya ada di urutan ketujuh.

dijelaskan motif majunya pasangan Alkhaer dalam Pemilukada terutama dalam upayanya mempertahankan kekayaan.

**Tabel 2: Perbandingan Angka Kekayaan Kandidat Calon Pemilukada Lombok Timur**

No.	Nama Calon	Jumlah Kekayaan	Keterangan
1.	Pasangan ALKHAER		
	Ali Bin Dahlan	14,8 Miliar	Dari tahun 2008 bertambah 5,4 Miliar
	H. Khaerul warisin	12,9 Miliar	Pada tahun 2010 angka kekayaan berjumlah 1,9 Miliar
2.	Pasangan MAFAN		
	H. Usman Fauzi	639 Juta	Pada tahun 2008 angka kekayaan berjumlah 576 Juta
	M. Ihwan Sutrisno	1,8 Miliar	Kekayaan berasal dari jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah periode 2009-2014
3	Pasangan SUFI		
	H. M. Sukiman Azmy	2,9 Miliar	Pada tahun 2010 angka kekayaan berjumlah 1,5 Miliar dan memiliki 1.804 dolar
	H.M. Syamsul Luthfi	2,8 Miliar	Pada tahun 2008 angka kekayaan berjumlah 736 Juta
4.	Pasangan WALY		
	H. Abdul Wahab	9,2 Miliar	Kekayaan sebagian besar ketika masih menjadi PNS Dinas Kehutanan Lombok Timur
	Hj. Lale Yaquunnafis	725 Juta	Kekayaan berasal dari beberapa aset di pondok pesantren NW Anjani.

Sumber: *Lombok Post*, 7 Mei 2013

### Pemilukada dan Upaya Pertahanan Kekayaan

Selain dibuktikan dengan tingkat kekayaan, penguatan lain atas justifikasi pasangan Alkhaer sebagai oligark juga datang dari motif majunya pasangan tersebut dalam Pemilukada Lombok Timur tahun 2013. Kuatnya motif pasangan Alkhaer maju demi mempertahankan serta memperluas kekayaan dapat dilihat ketika berbagai usaha yang dimiliki oleh calon perseorangan (terutama Ali BD) mulai diusik oleh pemerintah berkuasa. Pemerintah lokal Lombok Timur, mulai membatasi akses-akses jaringan bisnis yang dimiliki oleh pasangan perseorangan. Seperti kutipan salah satu orang terdekat pasangan perseorangan yang tidak dapat disebutkan namanya. Informan tersebut menyatakan bahwa “selama pemerintahan Sufi banyak sektor usaha

yang dimiliki oleh Pak Ali BD mulai diusik oleh pemerintah, sehingga menyebabkan bisnis tidak dapat berkembang secara maksimal terutama untuk hal proyek serta tender yang langsung datang dari pemerintah”.<sup>12</sup>

Selain itu, berhentinya proses pengerjaan Labuhan Haji menjadi pembuktian atas nafsu besar pasangan Alkhaer dalam upaya pertahanan kekayaan. Telah sejak lama Ali BD terus memperjuangkan pembangunan Labuhan Haji, terutama ketika masih menjabat sebagai bupati. Anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit menyentuh angka 87 miliar baik dari pos APBD kabupaten maupun pos APBD provinsi, besarnya biaya pembangunan tidak serta merta menyelesaikan proyek tersebut.<sup>13</sup> Labuhan Haji dianggap sebagai infrastruktur utama karena usaha calon perseorangan sangat bergantung pada keberadaan pelabuhan tersebut.

Setelah lengser dari jabatannya, keberlangsungan proyek pengerjaan Labuhan Haji terhenti total. Pembangunan yang telah menyentuh angka 80 persen dihentikan pembangunannya dan dibiarkan terbengkalai, hingga pada beberapa sudut mulai rusak. Indikasi tersebut kemudian dibuktikan ketika pasangan Alkhaer kembali menjabat. Pemerintahan di bawah komando pasangan Alkhaer langsung memfokuskan pembangunan pada Labuhan Haji. Meskipun saat itu Lombok Timur sedang mengalami defisit keuangan akibat warisan rezim pemerintahan

<sup>12</sup> Wawancara dengan salah satu informan yang tidak dapat disebutkan namanya pada tanggal 10 Desember 2013 Pukul 15.45.

<sup>13</sup> Diakses melalui laman web <http://www.sasak.org> dengan artikel berjudul “Menyingkap Tabir Kasus Terpendam di Bumi Gora”. Pada tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.15. Ada indikasi kuat bahwa uang proyek pengerjaan Labuhan Haji telah dikorupsi oleh sejumlah pihak diantaranya juga dilakukan oleh Eksekutif Lombok Timur.



sebelumnya.<sup>14</sup> Bahkan menurut pendapat seorang narasumber pasangan Alkhaer (Ali BD khususnya) rela menutupi seluruh hutang pemerintah Lombok Timur, asalkan kepemilikan serta keseluruhan pengelolaan Labuhan Haji menjadi domainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam kutipan wawancara di bawah ini:

“Sasaran infrastruktur utama yang menjadi perhatian pasangan perseorangan adalah pembangunan Labuhan Haji setelah sempat terhenti, padahal telah akan rampung. Kekehnya mempertahankan Labuhan Haji, hingga pak Ali pernah bilang kalau semua hutang Lombok Timur biar saya yang bayarkan, asalkan labuhan haji jadi punya saya”<sup>15</sup>

Nafsu untuk terus melanjutkan pembangunan Labuhan Haji menjadikan banyak infrastruktur lain yang sangat mendesak dibutuhkan masyarakat namun tidak berimplikasi positif terhadap kelangsungan usaha oligark pasangan perseorangan diabaikan. Bendungan (Dam) Pandandure misalnya, diabaikan proses pembangunannya di mana sebagian besar alokasi anggaran yang digunakan

---

<sup>14</sup> Diakses melalui laman web <http://www.lombokita.com> dengan artikel yang berjudul “Wabup: Lombok Timur defisit 114 miliar” pada tanggal 29 September 2013 pukul 22.30. Pada tahun 2012 Kabupaten Lombok Timur mengalami defisit hingga 92 miliar, dan meningkat drastis menjadi 114 miliar pada tahun 2013. Defisit anggaran ini menyebabkan pengajuan APBD murni yang telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur harus ditolak oleh pemerintah provinsi karena dianggap masih bermasalah. Tidak hanya sampai disitu, Kabupaten Lombok Timur terancam *disclaimer* oleh pemerintah pusat dan masyarakatlah yang akan sangat dirugikan. *Disclaimer* merupakan istilah yang diberikan kepada daerah yang tidak mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat. Implikasinya adalah daerah tersebut sulit atau bahkan tidak akan mendapatkan program dari pemerintah pusat. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan efisiensi anggaran oleh pemerintah daerah.  
<sup>15</sup> Wawancara dengan seorang narasumber yang tidak dapat disebutkan namanya.

untuk membebaskan tanah dialihkan untuk Labuhan Haji.

Meskipun hal tersebut diakui sebagai sebuah kecenderungan untuk menciptakan monumen bagi masing-masing periode kepemimpinan, namun seiring berjalannya waktu (terutama setelah Ali BD menjabat kembali), terlihat bahwa pembangunan Labuhan Haji lebih dari sekedar sebuah monumen.<sup>16</sup> Labuhan Haji digunakan sebagai upaya menopang kelangsungan bisnis dan kelancaran arus barang usaha-usaha Ali BD maupun Khaerul Warisin.

### **Menata Kekuasaan: Material dan Mobilisasi**

Selama Pemiluada berlangsung, setidaknya pasangan Alkhaer menggunakan dua kekuasaan utama yang dimiliki untuk merebut suara pemilih. Sumberdaya kekuasaan *pertama* datang dari kekuasaan material yang dimiliki. Sebagai seorang oligark, penggunaan sumberdaya material menjadi langkah logis yang dilakukan oleh pasangan Alkhaer. Secara sadar atau tidak sadar, sumberdaya material telah mengambil porsi cukup besar dalam upaya meraup suara di masyarakat. Hal tersebut didasarkan atas meningkatnya jumlah pemilih pragmatis. Seperti yang diungkapkan oleh seorang broker suara dan diperkuat oleh kutipan wawancara seorang masyarakat yang menyatakah bahwa:

“Kita sudah kecewa dengan pasangan yang kita dukung, sekarang kita tinggal menunggu pasangan calon mana yang mau memberikan uang kepada kita itulah yang akan kita pilih pada saat pencoblosan”<sup>17</sup>

Belum ada angka pasti berapa besaran material yang telah dikeluarkan oleh pasangan

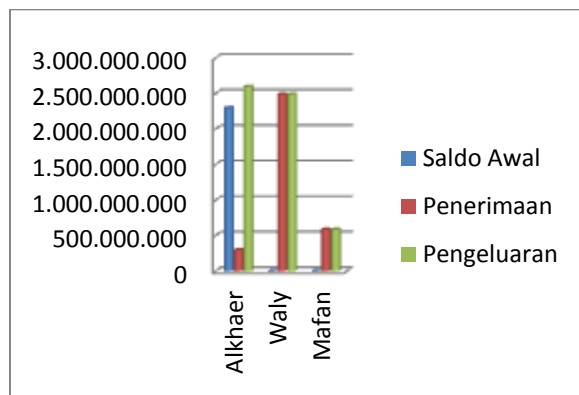
---

<sup>16</sup> *Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan* oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2010.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tris, tim sukses pasangan Sufi, pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 10.30.

Alkhaer. Jika merujuk pada rilis data resmi yang dikeluarkan KPU, pengeluaran pasangan Alkhaer menyentuh angka 2.597.977.000 miliar rupiah. Angka tersebut merupakan tertinggi dibandingkan dua calon lainnya, karena tidak adanya rilis angka pasti untuk pasangan Sufi. besarnya pengeluaran tersebut juga terlihat dari saldo awal pasangan Alkhaer, di mana kedua pasangan tersebut mengeluarkan uang sejumlah 2.300.000.000 miliar rupiah dari kantong pribadinya. Bahkan menurut hasil wawancara yang dilakukan pada Arif Rahman Maladi diketahui bahwa masing-masing kandidat mengeluarkan setidaknya 3 miliar rupiah.<sup>18</sup> Sebaran data pengeluaran tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram 2 di bawah ini:

**Diagram 2: Laporan Keuangan Kandidat Calon**



Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

Besarnya kekuasaan material yang dikeluarkan oleh pasangan Alkhaer juga dapat dibaca dari program Tali Asih yang dilakukan. Program ini memberikan uang sejumlah 200

<sup>18</sup> Wawancara dengan Arif Rahman Maladi Ketua Tim Advokasi Pasangan Alkhaer pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 19.50. Meskipun data tersebut belum dapat di kroscek keabsahannya pada tim pemenang lain, namun mengingat posisi Arif dalam struktur tim pemenang dan kedekatannya dengan pasangan Alkhaer sudah dapat dipastikan keabsahan data tersebut.

ribu bagi setiap masyarakat yang memberikan KTP-nya, atau dalam bahasa lain tim pemenang akan memberikan bayaran pada setiap KTP yang diserahkan masyarakat. Dari program ini saja, setidaknya pasangan Alkhaer mengeluarkan material hingga menyentuh angka 10.839.200.000 miliar rupiah jika didasarkan atas jumlah KTP yang berhasil dikumpulkan, yakni menyentuh angka 54.196 KTP yang tersebar di 20 kecamatan.

Besarnya material pasangan Alkhaer berimplikasi pada model pendekatan yang dilakukan terhadap masyarakat. Pada beberapa daerah, terutama yang bukan merupakan kantong suara pasangan Alkhaer atau daerah dengan karakteristik pemilih pragmatis, praktik *money politics* lazim digunakan pasangan Alkhaer. Hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang broker suara yang menyatakan bahwa setidaknya pasangan Alkhaer memberikan uang sejumlah 50 ribu kepada masyarakat, bahkan hingga 1 juta rupiah. Perbedaan tersebut didasarkan pada tingkat pengaruh individu tersebut di tengah masyarakat, semakin berpengaruh individu tersebut semakin tinggi uang yang diberikan.

Bahkan pada satu kasus lain kekuasaan material pasangan Alkhaer tergambar ketika mampu membayar suara masyarakat di salah satu lingkungan.<sup>19</sup> Secara lebih rinci disebutkan bahwa sebelumnya masyarakat lingkungan tersebut sudah berada di bawah “pengelolaan” pasangan lain. Hal tersebut karena keterlambatan pasokan material menjelang pemungutan suara masyarakat tersebut mengalihkan dukungannya pada pasangan Alkhaer yang ternyata mampu memberikan sejumlah uang di lingkungan tersebut.

<sup>19</sup> Berdasarkan wawancara salah satu tim pemenang pasangan Sufi yang tidak dapat disebutkan namanya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 pukul 10.30. Lingkungan adalah daerah setingkat dusun.

Praktik *money politics* yang dilakukan pasangan Alkhaer juga dilakukan dengan cara-cara lain yang lazim ditemukan dalam setiap Pemilu, yakni, membagikan sembako. Intensitas pembagian sembako, hampir dilakukan setiap hari ke tengah masyarakat. Sebagian besar sembako yang disebar berasal dari salah satu gundang beras yang dimiliki oleh pasangan tersebut. Pembagian sembako tidak dalam jumlah sedikit, menurut salah seorang tim pemenangan dalam sehari minimal masyarakat mendapatkan 5 kg beras dan beberapa kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

Signifikansi besarnya kekuasaan material pasangan Alkhaer juga termanifestasikan dalam bentuk struktur pemenangan tim. Berdasarkan data yang dihimpun dari internal pasangan Alkhaer, setidaknya terdapat sekitar 1.449 orang yang terdaftar dalam tim pemenangan pasangan perseorangan, mulai tingkat kabupaten hingga tingkat terkecil yakni lingkungan.<sup>20</sup> Namun, jumlah tersebut bukanlah jumlah total keseluruhan anggota tim formal pasangan Alkhaer, karena dari data yang diberikan masih ada beberapa kecamatan yang belum menyerahkan daftar jumlah anggota yang dimiliki. Dalam data tersebut sangat mungkin belum termasuk jumlah tim pemenangan di tingkat lingkungan (setingkat dusun), dengan jumlah tidak kalah besar karena asumsinya adalah setiap lingkungan minimal terdapat empat orang anggota (satu ketua dengan tiga sampai empat orang anggota).<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Berdasarkan data yang dihimpun dari tim pemenangan pasangan Alkhaer antara lain data tim pemenangan kabupaten, kecamatan, hingga desa, serta data pedoman rapat tim pemenangan Alkhaer

<sup>21</sup> Sebagian besar data tim pemenangan di tingkat desa masih bermasalah, dimana masih ditemukan data yang belum lengkap atau struktur pemenangan di tingkat desa masih belum terbentuk. Namun jumlah pasti tim pemenangan di tingkat desa tersebut

Besarnya struktur tim pemenangan pasangan Alkhaer berkorelasi langsung dengan jumlah material yang harus dikeluarkan. Belum ada jumlah pasti berapa besaran uang yang dialokasikan oleh pasangan Alkhaer untuk dapat menggerakkan besarnya struktur tim pemenangan. Hal tersebut karena sebagian besar koresponden maupun orang terdekat pasangan Alkhaer sangat tertutup terkait dengan besaran dana yang dikeluarkan.

Sebagai estimasi, menurut pendapat sekretaris tim pemenangan setidaknya terdapat satu orang saksi dalam setiap TPS dan tersebar di total 2.178 seluruh Lombok Timur, di mana setiap saksi mendapatkan bayaran 100 ribu rupiah.<sup>22</sup> Artinya diperluakan setidaknya uang sebesar 217.800.000 juta rupiah, jumlah tersebut digunakan hanya untuk membayar honor saksi di tingkat TPS, di luar honor tim di tingkat yang lebih tinggi dan biaya operasional lainnya. Besarnya anggaran pada setiap TPS yang dikeluarkan pasangan Alkhaer kemudian diperkuat oleh pendapat Ketua Tim Hukum dan Advokasi, yakni Arif Rahman Maladi yang menyatakan bahwa “setidaknya telah dianggarkan uang 400 juta rupiah hanya untuk tingkat TPS pada saat pemilihan”.

Sumberdaya kekuasaan *kedua* yang digunakan pasangan Alkhaer adalah kekuasaan mobilisasi. Kekuasaan mobilisasi dilakukan pada dua kelompok elit berpengaruh di Lombok Timur, yakni Tuan Guru dan birokrasi. Kedekatan pasangan Alkhaer pada beberapa Tuan Guru memudahkannya untuk melakukan

---

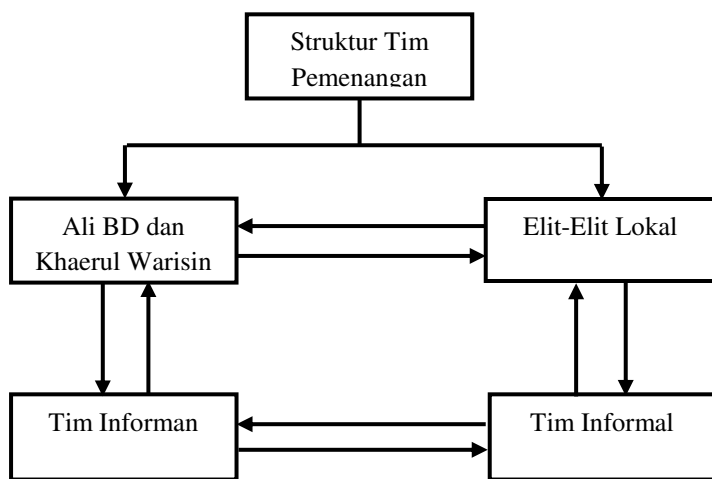
telah diklarifikasi pada sekretaris tim sukses pasangan Alkhaer, yakni M. Tohri.

<sup>22</sup> Berdasarkan wawancara via sms dengan sekretaris pemenangan Alkhaer pada tanggal 4 Mei 2014. Dari hasil wawancara tersebut peneliti melakukan kalkulasi dengan mengalikan jumlah uang dan jumlah saksi yang terdapat di setiap TPS-nya. Angka tersebut masih mungkin bertambah karena honorarium tersebut hanya untuk saksi di tingkat TPS.

mobilisasi. Di sisi lain latar belakang Ali BD maupun Khaerul Warisin yang pernah lama di birokrasi menjadi pendorong utama berhasilnya mobilisasi birokrasi yang dilakukan.

Sebagian besar Tuan Guru dan birokrasi yang menjalin afiliasi dengan pasangan Alkhaer tergabung dalam tim informal. Proses pembentukannya-pun berlangsung pada dua arah. Di satu sisi tim informal terbentuk berdasarkan inisiatif atau inisiasi yang dilakukan oleh Ali BD maupun Khaerul Warisin. Beberapa tim informal bentukan pasangan ini antara lain adalah Tim A, Tim X, Tim Silver, Tim Pencari Fakta (TPF), TUR, W. Alkhaer, HG dan beberapa kelompok lain yang tidak dapat diakses selama penelitian. Sedangkan di sisi lain terbentuknya informal merupakan inisiatif dari masyarakat, seperti misalnya tim TG (Tuan Guru), Persagi, dan PNS. Hal tersebut kemudian berdampak pada pora relasi yang terbentuk dari tim pemenangan dan tim-tim informal tersebut, seperti yang akan diperlihatkan dalam bagan 4 di bawah ini:

**Bagan 4: Relasi Pasangan Alkhaer dan Tim Informal**



Sumber: Diolah oleh penulis, 2014

Bagan 4 di atas berusaha menjelaskan bahwa tim pemenangan informal yang sebagian besar merupakan elit politik lokal termasuk Tuan Guru dan birokrasi memiliki keistimewaan.

Keistimewaan tersebut terlihat dari model relasi yang terbangun, di mana tidak ada garis hierarkis atau hubungan atasan bawahan antara pasangan Alkhaer dengan tim informal. Tim informal bebas memberikan masukan terhadap pasangan Alkhaer, begitu pula sebaliknya pasangan Alkhaer bebas memberikan padangan terkait strategi tim pemenangan di tengah masyarakat.

Mobilisasi Tuan Guru menjadi pilihan logis mengingat Lombok Timur merupakan basis kelompok masyarakat muslim terbesar dan jaringan pondok pesantren. Setidaknya terdapat empat nama Tuan Guru yang selalu mencuat dan identik dengan tim informal pasangan Alkhaer, seperti yang akan diperlihatkan pada tabel 3 di bawah. Bahkan pengakuan salah seorang setidaknya terdapat 30 Tuan Guru yang telah menyatakan dukungan terhadap pasangan Alkhaer, namun keterbatasan akses dan sumberdaya menjadi penghalang utama upaya melacak nama Tuan Guru tersebut.

Bagaimana kemudian pasangan Alkhaer melakukan mobilisasi terhadap Tuan Guru tersebut? Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan pengajian sebagai media penguatan posisi Alkhaer di tengah masyarakat. Dengan melakukan penetrasi mobilisasi keagamaan melalui pengajian memberikan keuntungan karena posisi pengajian yang sangat strategis.

Pengajian merupakan arena kampanye gratis yang mampu mendatangkan massa dalam jumlah besar. Terbatasnya waktu kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU, menjadikan pengajian menjadi alternatif lain dalam mensosialisasikan kandidat calon kepada pemilih. Mendatangi pengajian selain itu dianggap mampu menghemat pengeluaran, karena telah menjadi rahasia umum bahwa kampanye terbuka di lapangan memerlukan biaya besar. Di satu sisi kandidat harus

menyediakan hiburan, dan di sisi lain kandidat harus mengganti uang transportasi kepada masyarakat yang telah datang.

**Tabel 3: Tuan Guru Pendukung Alkhaer**

No.	Nama	Daerah	Keterangan
1.	TGH. Abdul Latif	Mamben	Pimpinan majelis Al-Ikhlas
2.	TGH. Saleh Yahya Ibrahim	Moyot	Pimpinan Yayasan Darussalam
3.	TGH. Mukmin	Banjarsari	Mubaligh
4.	Ustadz Husairi	Jerong	Mubaligh

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2014.

Di sisi mobilisasi birokrasi, kepintaran pasangan Alkhaer terlihat ketika mampu memanfaatkan situasi dengan menggandeng para birokrat yang merasa kecewa pada pemerintahan Sufi. Para birokrat menganggap pemerintahan Sufi lebih banyak merugikan para birokrat, di mana keadaan tersebut dianggap jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Ali BD.

Beberapa kelompok birokrat akhirnya mulai melakukan afiliasi politik dengan pasangan Alkhaer, baik secara eksplisit maupun implisit. Hasilnya terbentuknya tim-tim yang mengakomodasi para kelompok birokrat tersebut, yakni tim PNS, Tim Guru (baik PNS maupun honorer) serta Tim Persagi (Persatuan Ahli Gizi). Keberadaan para tim birokrasi tersebut sangat membantu dalam menghalau kekuatan pasangan Sufi yang secara umum tersusun atas petinggi birokrasi.

Salah satu elit birokrasi yang mendukung pasangan Alkhaer adalah kepala dinas Pendidikan Lombok Timur. Posisinya yang dahulu kontra kini berubah menjadi pro terhadap pasangan Alkhaer. Kekuasaan kepala dinas pendidikan Lombok Timur tidak diragukan lagi, seperti pada 2008 ketika dirinya

mampu mengumpulkan masa untuk menghapuskan zakat pegawai dan menjadi motor utama dalam menjatuhkan Ali BD.

Mobilisasi birokrasi yang dilakukan pasangan Alkhaer nyatanya telah memberikan kontribusi dalam menghalau kekuatan pasangan petahana dalam menggerakkan birokrasi pemerintahan. Penggunaan kekuasaan mobilisasi birokrasi menjadi varian baru bagi oligark di tingkat lokal. Para oligark tidak lagi menggantungkan kekuasaannya pada material. Namun diperlukan prasyarat untuk dapat melakukan mobilisasi birokrasi seperti pasangan Alkhaer, di mana setidaknya pasangan Alkhaer memiliki jaringan di dalam birokrasi tersebut. Tanpa adanya jaringan, sangat kecil peluang untuk melakukan mobilisasi birokrat, kecuali kembali melakukan pengerahan kekuasaan material untuk “membeli” birokrat.

### **Catatan Penutup: Berkuasanya Oligark**

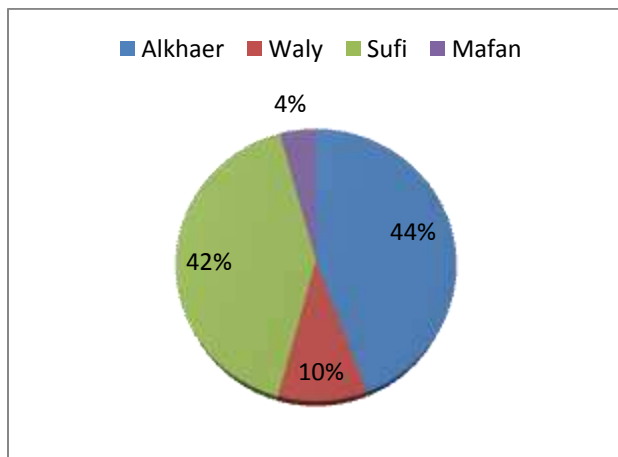
Kombinasi antara kekuasaan material dan kekuasaan seperti yang telah dijelaskan di atas, dianggap mampu menghantarkan pasangan Alkhaer memenangkan Pemilukada Lombok Timur tahun 2013. Instrumen jaringan oligark dan jaringan elit mampu mengalahkan sumberdaya elit serta koalisi partai-partai politik di tingkat lokal, meski partai tersebut memiliki kursi di parlemen lokal.

Meskipun antara calon perseorangan dan calon petahana masing-masing membagi rata kemenangan pada 10 kecamatan berbeda, namun pada beberapa kecamatan perolehan suara pasangan petahana jauh sangat kontras dengan perolehan suara calon perseorangan. Ketatnya pertarungan dua kandidat tersebut bagaikan sebuah pengulangan pada Pemilukada tahun 2008 silam.

Sampai dengan akhir penghitungan suara, pasangan Alkhaer dipastikan menjadi pemenang dengan perolehan 272.726 suara, atau

unggul tipis dari pasangan Sufi yang memperoleh 255.387 suara yang tergambar dalam diagram di bawah. Ditempat ketiga diduduki oleh pasangan Waly dengan suara mencapai 61.276 suara atau sekitar 9,95 persen.

**Diagram 3: Rekapitulasi Suara Pemilukada Lombok Timur tahun 2013**



Sumber: KPU Kabupaten Lombok Timur.

Perolehan suara pasangan Waly jauh di bawah kalkulasi perolehan suara koalisi partai politik pada Pemilu legislatif tahun 2009. Posisi terakhir ditempati oleh pasangan Mafan dengan perolehan suara sebesar 26,510 suara atau 4,30 persen. Perolehan suara pasangan Mafan juga jauh berada di bawah kalkulasi, atau kehilangan 12 persen suara pemilih jika dilihat dari persentase suara-suara parpol pengusung.

Jika diperhatikan, kemenangan terbesar pasangan Alkhaer diperoleh pada tiga kecamatan yang menjadi barometer Pemilukada di Lombok Timur. Kecamatan tersebut adalah Selong, Labuhan Haji, dan Masbagik. Kemenangan pada tiga kecamatan tersebut adalah dampak utama diterapkannya dua kekuasaan yang digunakan oleh pasangan Alkhaer (seperti yang akan diperlihatkan dalam tabel 4 di bawah). Terutama untuk Kecamatan Selong yang merupakan basis masa NW dengan jaringan pondok pesantrennya. Hal ini mengindikasikan bahwa pemilih NW di wilayah Selong mulai beralih menjadi pemilih

rasional dengan mempertimbangkan untung dalam memilih calon.

Kemenangan tersebut semakin mempertegas dan menjadi pembuktian lahirnya kelas baru terutama dari kelompok oligark. Pergeseran tersebut terjadi setelah dalam banyak studi terdahulu dinyatakan bahwa demokrasi hanya diciptakan untuk mengakomodasi elit, baik elit pusat maupun elit daerah. Seperti Dahl mengutip dari Mochtar Pabottingi menyatakan bahwa tidak ada satu demokrasi-pun di mana rakyat benar-benar memimpin, yang ada hanyalah pemerintahan segelintir elit.<sup>23</sup> Sedangkan Olle Tornquist dalam tulisannya berjudul “Defisit Politik Demokratisasi Substansial” menyebutkan ada pertarungan antara kaum elit dan demokratisasi masyarakat.<sup>24</sup>

**Tabel 4: Analisis Kemenangan Pasangan Alkhaer pada Tiga Kecamatan**

No.	Nama Kecamatan	Perolehan Suara		Analisis Kemenangan
		2008	2013	
1.	Selong	17.764	25.050	Andil besarnya suara <i>swing voters</i> yang dimenangkan. Pemilih dari kalangan agama khususnya NW mendesak adanya perubahan karena meskipun terjadi pertumbuhan di daerah namun masyarakat “kelaparan”
2.	Masbagik	21.477	26.104	Masyarakat dengan sebagian besar merupakan pengusaha merasakan dampak langsung kebijakan pemerintahan Sufi yang tidak memihak pengusaha. Dengan citra sebagai pengusaha Ali BD dan Khairul warisan, mendorong pemilih mengalihkan pilihannya pada pasangan Alkhaer.
3.	Labuhan Haji	16.777	19.340	Labuhan Haji merupakan kecamatan dekat dengan pusat pemerintahan. Besarnya andil Ali BD dalam membangun kecamatan ini berimplikasi pada semakin kuatnya posisi pasangan Alkhaer untuk menang.

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2014.

Dinamika tersebut semakin memperkuat asumsi bahwa telah terjadi perampasan kekuasaan negara oleh berbagai pihak terutama

<sup>23</sup> Syamsuddin Haris (ed). *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten/ Kota*. Jakarta: LIPI. 2007. Hlm. XV.

<sup>24</sup> Olle Tornquist. “Defisit Politik Demokratisasi Substansial”. dalam John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist (ed). *Politikasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos. 2004. Hlm.286.

oleh para pejabat untuk memajukan kepentingan pribadi. Jelas bahwa meskipun dalam demokrasi memungkinkan adanya kompetisi, namun kompetisi tersebut telah terfragmentasi antara elit maupun oligark. Dengan kemenangan oligark di tingkat lokal, maka agenda pertahanan dan perluasan kekayaan akan terus berlangsung, serta semakin memperpanjang masa olirarki di tingkat lokal Lombok Timur.

Fenomena Lombok Timur kemudian juga telah memberikan sumbangsih berarti dalam kepustakaan elit, oligark, maupun oligarki. Kecenderungan oligarki yang terjadi di Lombok Timur pada studi ini memperlihatkan bahwa, oligarki telah bertransformasi dalam bentuk varian lebih luas. Teori oligarki khususnya yang dikemukakan oleh Winters membuka khazanah keilmuan baru. Oligarki tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan bertumpu pada sebagian kecil elit seperti tipologi yang dikemukakan oleh Aristoteles. Oligarki tidak hanya melihat kekuasaan pada sedikit orang, dimana jumlah orang berkuasa (sedikit) dalam sistem politik bukanlah merupakan ukuran dari oligarki. Lebih daripada itu, oligarki merupakan upaya pertahanan kekayaan oleh kaum kaya (superkaya) atau disebut sebagai oligark.

## Daftar Pustaka

Bourricaud, Francois. "Structure and Function of The Peruvian Oligarchy." dalam *Journal Comparative International Development*. Springer Science & Bussines Media B.V.

Dahl, Roberth A. 1971. *Polyarchy: Partisipating and Opposition*. USA: Yale University Press.

Diakses melalui laman web <http://metropolitan.inilah.com> dengan artikel berjudul "Inilah Daftar Pejabat Terkaya Se-Provinsi NTB" pada tanggal 30 April 2013 pukul 01.10.

Diakses melalui laman web <http://www.lombokita.com> dengan artikel yang berjudul "Wabup: Lombok Timur defisit 114 miliar" pada tanggal 29 September 2013 pukul 22.30.

Diakses melalui laman web <http://www.sasak.org> dengan artikel berjudul "Menyingkap Tabir

Kasus Terpendam di Bumi Gora". Pada tanggal 1 Mei 2014 pukul 17.15.

Fukuoka, Yuki. 2013. "Oligarchy and Democracy in Post Suharto Indonesia" dalam jurnal *Political Studies Review: 2013 Vol 11*. Australia: Political Studies Association.

Hadiz, Vedi R. 2013. "The Rise of Capital dan Keniscayaan Ekonomi-Politik". dalam *Prisma Vol. 32, No. 1, 2013*. Jakarta: LP3ES.

Haris, Syamsuddin (ed). 2007. *Partai dan Parlemen Lokal Era Transisi Demokrasi di Indonesia: Studi Kinerja Partai-Partai di DPRD Kabupaten/ Kota*. Jakarta: LIPI.

*Kajian Akademik Pemekaran Kabupaten Lombok Selatan* oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2010.

Keller, Suzana. 1984. *Penguasa dan Kelompok Elit: Peran Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: Rajawali Press.

Rabbah, Riyanto. 2013. *Ali BD: Sang Pendobrak*. Mataram: ADC Institute.

Tornquist, Olle. 2004. "Defisit Politik Demokratisasi Substansial". dalam John Harriss, Kristian Stokke, dan Olle Tornquist (ed). *Politikasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.

Wawancara dengan Arif Rahman Maladi Ketua Tim Advokasi Pasangan Alkhaer pada tanggal 14 Mei 2014 pukul 19.50.

Wawancara dengan M.Sholeh pada tanggal 20 April 2014 pukul 17.45.

Wawancara dengan salah satu informan yang tidak dapat disebutkan namanya pada tanggal 10 Desember 2013 Pukul 15.45.

Wawancara dengan Tris, tim sukses pasangan Sufi, pada tanggal 12 Desember 2013 pukul 10.30.

Winters, Jeffrey A. 2011. "Oligarchy and Democracy". dalam *Jurnal The American Interest Volume VII, 2 Holidays (November/December 2011)*. Washington DC: The American Interest.

Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia.